

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjalanan bangsa ini tercatat di sejarah bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun rentang 1596 hingga 1945. Waktu yang panjang tersebut mendikotomikan bangsa penjajah dan terjajah dibedakan berdasarkan warna kulit. Kulit cokelat “dipersepsikan” sebagai golongan terjajah, sedangkan kulit putih menjadi penjajah, cerita ini seakan mendapatkan pembenaran begitu saja tanpa ada uraian kritis. Pertanyaan kemudian, sesederhana itukah pembedaan antara penjajah dan terjajah. Penjajah “Belanda” yang secara jumlah baik penduduk maupun luas wilayah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan luas dan penduduk bangsa ini, mustahil dapat terlibat sendirian dalam meneguhkan kekuasaannya tanpa melibatkan penguasa yang terlebih dahulu berkuasa.

Sebelum kedatangan bangsa Belanda, penguasa pribumi meneguhkan kekuasaannya dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang berlangsung dalam waktu yang panjang. Masa yang lama tersebut menciptakan ideologi yang tertanam di masyarakat yang berlangsung secara turun-temurun, baik sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Karenanya bangsa penjajah tidak serta merta merobak struktur sosial yang telah ada, sebaliknya kekuasaan tersebut terus diteguhkan. Dengan strategi ini kekuasaan kolonial menggunakan alat penguasa pribumi sebagai “sekutu” untuk melakukan praktek kekuasaannya. Pengaruh kekuasaan ini tetap dilanggengkan, fungsinya,

sebagai kontrol kekuasaan agar dapat terus berlangsung agar kekuasaan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Penulisan literatur sejarah banyak yang mengungkap penjajahan dan penjajah berdasarkan identik dengan kulit putih dan terjajah sebaliknya. Mengapa ini dapat terjadi, karena penulisan alur sejarah pada dasarnya ditentukan dengan selera sang penguasa. Maka ada istilah, siapa yang berkuasa dia yang menentukan alur sejarah. Karena itu, untuk melakukan “perlawanan” terhadap alur sejarah yang berdasarkan kepentingan sang penguasa, penting dilakukan tulisan-tulisan tandingan. Kerja ini dilakukan bukan untuk membela kulit putih atau mendeskreditkan golongan tertentu, melainkan mengungkap bahwa penguasaan bangsa “kulit putih” dapat terus berjalan karena di topang oleh penguasa lokal yang membangun kekuasaannya dengan membuat segala fondasi baik yang sifatnya memaksa maupun dilakukan penundukan dengan cara yang lebih halus. Pengungkapan mengenai sejarah ini sebagai bagian dari suatu kerja alternatif untuk membongkar keculasan praktek kekuasaan kolonial

Karya alternatif seperti penulisan sastra penting sebagai sebuah kerja politik untuk membongkar kedok penguasaan jajahan atas wilayah tidak selalu identik dengan pengkotak-kotakan yang dalam pembagiannya diidentifikasi berdasarkan ras tertentu. Karena itu pengungkapan praktek kekuasaan kolonial yang dilakukan oleh bangsa penjajah yang selama banyak bersembunyi di balik penegasan warna kulit. Karya sastra dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap watak

penjajahan itu berlangsung dengan melihat peran serta penguasa pribumi sebagai kelas yang berkuasa demi teguhnya penjajahan kolonial.

Dari beberapa karya sastra yang berbicara mengenai praktek kekuasaan kolonial dari sudut pandang yang berbeda, salah satu sastrawan yang membahasnya adalah Pramoedya Ananta Toer dalam karyanya yang berjudul *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Buku ini ditulis mengalir, tanpa pembagian bab, dengan tema yang terbagi dalam beberapa cerita. Adapun tema-temanya cerita mencakup pembantaian masa Jan Pietersz Coen tahun 1621 di Bandaneira yang mengurai banyaknya tawanan perang untuk di jadikan budak yang tenaganya digunakan dalam membangun kota-kota besar. Begitupun sebaliknya masa Daendels dengan Jalan Posnya (1808), sebuah proyek ambisius seorang gubernur Jenderal yang memakan banyak korban jiwa akibat panjangnya jalan dan waktu kerja yang begitu berat. Setelah itu *CultuurStelsel* (Tanampaksa selama 1830-1870), lagi-lagi tenaga kerja yang berasal dari rakyat jelata banyak menjadi korban karena waktu kerja yang semakin banyak dengan imbalan yang tidak sebanding.

*Jalan Raya Pos, Jalan Daendels* mengurai terjadinya praktek kekuasaan Kolonial di mana pemerintah Belanda meneguhkan kekuasaannya melibatkan “penguasa-penguasa” pribumi sebagai kaki tangannya dalam mengeksploitasi massa rakyat (Toer, 2008). Seperti pada masa pemerintahan Daendels, ketika untuk pertama kali merombak sistem politik Hindia Belanda dengan melibatkan para pegawai Hindia yang berasal dari kalangan bangsawan maupun priyayi. Dapat dikatakan dengan bergabungnya kaum pribumi menciptakan sebuah birokratisme di dalam

pemerintahan kolonial Belanda. Dengan cara ini secara tidak langsung telah terjadi sebuah persekutuan antara penguasa Belanda dengan para bangsawan dan priyayi. Yang dalam kelanjutannya semakin menciptakan hubungan yang hangat diantara kedua kelas penguasa tersebut. (Mardiahono, 2009:57-58). Persekutuan itu dapat terjadi karena penguasa Belanda tetap memberikan hak-hak istimewa yang secara politik agar tetap terlihat tetap teguh di mata masyarakat, walaupun dalam prakteknya kekuasaan para raja sedikit-demi sedikit dilucuti.

Praktek kekuasaan kolonial yang dijalankan terlihat pada masa pembangunan Jalan Raya Pos di mana Daendels memerintahkan melebarkan sampai 7 meter. Untuk penyediaan jatah tenaga kerja, Daendels meminta kepada para Bupati yang wilayahnya di lalui proyek tersebut. Semua batu untuk peninggian dan pengerasan, rakyat kecil, para petani yang harus setor, dan tanpa imbalan. Atau dengan imbalan, hanya orang atasan-atasan tertentu yang menerimanya. Atasan tertentu berarti para pembesar putih atau cokelat, atau juga putih dan cokelat bersama-sama (Toer, 2008:7). Kesengsaraan yang tergambar terlihat ketika banyak korban tewas akibat kebijakan Daendels tersebut, dalam sebuah laporan yang dilansir oleh sumber Inggris tercatat korban kurang lebih mencapai 12.000 jiwa. Yang di Grobogan 3000 sementara ada yang menyebut angka 5000 ( Toer, 2008: 22). Begitupun saat sistem Tanampaksa diberlakukan pada masa Van Den Bosch. Di banyak daerah, demi membiayai penjajahan dan penjajah, petani banyak tewas kelaparan karena tidak menggarap sawah dan ladangnya sendiri, seluruh perhatian

tenaganya di curahkan untuk komoditi yang telah di tentukan oleh pemerintah kolonial.

Ada yang menarik dari karya ini. Pertama, ia membuat cerita sejarah berdasarkan sumber tulisan yang ada namun dibuat dengan gaya sastra, di mana ia ditampilkan sebagai tokoh di dalam cerita, tampilnya Pram sebagai tokoh yang ada dalam cerita ini menjadi keunikan tersendiri di buku ini. Kedua, isi cerita itu sendiri yang tidak dibagi dalam beberapa bab, tetapi dibuat cerita dan topik yang mengalir dengan tema utama terdapat pada satu halaman. Ketiga, alur cerita di dalam *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels* itu sendiri, bagaimana Pramoedya mengemas pesan tersembunyi, yaitu praktek kekuasaan yang dibangun terselip persekutuan yang dilakukan oleh penguasa pribumi (bupati/kaum bangsawan/kaum feodal) dan penguasa Belanda baik dengan cara yang sifatnya ideologis maupun represif.

Pramoedya di dalam *Jalan Pos*, menggunakan bahasa yang sedemikian halus dalam membongkar terjadinya perselingkuhan praktek kekuasaan antara penguasa kulit putih dengan penguasa kulit coklat dengan memanfaatkan struktur sosial yang ada di masyarakat. Pelanggaran kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa baik oleh bangsa kulit putih maupun kulit coklat di bumi Nusantara berlangsung secara sistematis, di mana kelompok mayoritas yang mengalami kerugian paling besar, mereka mengalami ketidakberdayaan dalam segala bidang mulai dari sosial, ekonomi maupun politik. Peralihan kekuasaan yang terjadi tidak membawa perubahan yang signifikan, bahasa-bahasa kesamaan rasa atau satu bangsa hanya sebuah kamufase untuk pelanggaran kekuasaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini sendiri dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana praktek kekuasaan kolonial di dalam buku *Jalan Raya Pos, Jalan Raya Daendels*”?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengungkap praktek kekuasaan kolonial di dalam buku *Jalan Raya Pos, Jalan Raya Daendels*?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis: Dapat dijadikan rujukan bagi penelitian komunikasi bagaimana pesan itu ditampilkan dengan menggunakan metode analisis wacana.
2. Secara praksis: Bisa dijadikan salah satu referensi di dalam ilmu komunikasi khususnya mengenai karya sastra sejarah sebagai salah satu media penyampaian suatu ide/gagasan

## **E. Kerangka Teori**

### **E.1. Komunikasi sebagai Proses Produksi Makna**

Komunikasi adalah sebuah ilmu sosial. Istilah komunikasi mengacu kepada teori tunggal. Jadi menurut Ojong Uchana Effendi dalam bukunya Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek (1994:9):

“Komunikasi itu sendiri atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti *sama*. Maksudnya sama di sini adalah sama makna.” (Uchana, dkk; 1994:9-10)

Orang yang terlibat dalam sebuah percakapan berarti mereka terlibat pada kesamaan makna mengenai apa yang ada dalam percakapan tersebut. Bahasa yang digunakan pun memiliki kesamaan dalam melakukan percakapan, akan tetapi sebaliknya kesamaan bahasa memiliki kesamaan makna. Percakapan tersebut bisa dikatakan berhasil apabila antara komunikan dan komunikator mengerti makna dari bahan yang dipercakapan.

Komunikator, komunikan, pesan, dan media merupakan sebagian dari elemen-elemen yang ada pada proses komunikasi. Proses komunikasi itu sendiri bukan hanya bagaimana cara atau pesan apa yang sampai pada komunikan, akan tetapi komunikasi yang baik yaitu bagaimana pesan yang sampai tersebut dapat mengandung makna-makna tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai *feedback*.

Secara sederhana komunikasi dapat dikatakan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan tanda ataupun lambang sebagai mediana. Namun menjadi tidak sesederhana itu ketika komunikasi bisa pula menjadi sebuah proses pertukaran makna. Dalam sebuah tanda yang dipertukarkan akan memerlukan makna-makna yang juga dipertukarkan untuk membentuk sebuah komunikasi yang baik. Seperti yang diungkapkan Fiske:

“Tatkala saya berkomunikasi dengan anda, anda memahami apa maksud pesan saya, lebih kurang secara akurat. Agar komunikasi berlangsung saya harus membuat pesan dalam bentuk tanda. Pesan-pesan itu mendorong anda untuk menciptakan makna untuk diri anda sendiri yang terkait dalam beberapa hal dengan makna yang saya buat dalam pesan saya. Makin banyak kita berbagi kode yang sama, maka makin dekatlah makna kita berdua atas pesan yang datang pada masing-masing kita” (Fiske, 2006:59).

Hal tersebut di atas akan mengacu pada bagaimana cara menciptakan makna. Ini yang akan memberikan penekanan yang berbeda dalam bidang komunikasi, karena dalam model tersebut tidak akan dilihat pada proses transmisi pesan, atau komunikasi sebagai proses penyampaian pesan, ini merupakan model struktural yang lebih menekankan pada relasi antara unsur-unsur dalam menciptakan makna. Model seperti ini bukan pada tahap atau langkah yang dilalui pesan melainkan pada relasi terstruktur sebuah pesan hingga memungkinkan sebuah pesan menandai sesuatu.

## **E.2 Kekuasaan**

Kekuasaan dapat dimaknai sebagai hubungan antara individu dengan individu (Bertens, 2001:320-321). Pengertian kekuasaan sebenarnya tidak hanya terbatas pada hubungan antar individu, tetapi menunjuk pada kontrol yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok yang didasari kekuatan baik secara ekonomi, sosial dan politik terhadap individu-individu lainnya. Kekuatan inilah yang melahirkan kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan berarti kontrol kelompok yang



termanifestasikan dalam suatu pengaruh atau kepatuhan terhadap seseorang dengan bersumber pada kekuatan yang dimiliki oleh orang lain.

Sementara itu, Van Dijk mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan dari suatu kelompok, satu kelompok untuk mengontrol kelompok dari kelompok lain (Van Dijk dalam Eryanto, 2001:272). Dalam hal ini, kekuasaan secara umum didasarkan pada kepemilikan atas sumber-sumber yang bernilai, seperti uang, status dan pengetahuan. Selain berupa kontrol yang bersifat langsung dan fisik, kekuasaan yang dipahami oleh Van Dijk, juga berbentuk persuasif: tindakan seseorang juga secara tidak langsung mengontrol dan mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap dan pengetahuan. Jadi, kekuasaan mengandung kontrol kelompok atas kelompok lain dalam mengendalikan atau mempengaruhi untuk berbicara dan bertindak sesuai yang diinginkan yang memiliki kekuasaan. Dasar kekuasaan dari kelompok dominan ini adalah akses terhadap uang, pengetahuan, pendidikan dibandingkan dengan kelompok yang tidak dominan (Junaedi, 2007:75).

Dalam kajian tradisi Jawa, kekuasaan itu berasal dari sumber yang sama. Maksudnya, kekuasaan yang dimiliki oleh satu individu maupun kelompok adalah sama di tangan individu atau kelompok lain. Dapat dimaknai sumbernya ada pada diri seorang raja dan keturunannya. Jadi, diartikan kekuasaan adalah homogen. Seorang Indonesianis, Ben Anderson menjelaskan konsep kuasa ini sebagai pergiliran kekuasaan yang bisa dimaknai dengan orang yang berkuasa akan mewarisi kekuasaan kepada keturunannya (Anderson, 2000:82-88). Dalam masyarakat modern, sering dijumpai orang Jawa yang mengaku masih dari keturunan Sultan Agung dari dinasti

Mataram atau memiliki peninggalan-peninggalan keramat (seperti keris, gong, dan sebagainya) dari penguasa tersebut. Pengakuan-pengakuan seseorang sebagai keturunan raja seperti Amangkurat I, II, III dan seterusnya, sering ditemukan, namun yang memiliki keahlian dalam berpolitik jarang. Permasalahannya, bukan keagungan historis kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan Agung ketika dia masih hidup, tetapi watak dari alam pikiran masyarakat Jawa yang tidak bisa membedakan orang yang masih hidup dengan yang sudah mati.

Dengan demikian, ada kesinambungan kekuasaan dimana orang yang sudah mati masih tetap berkuasa di dalam pemikiran masyarakat Jawa (Anderson, 2000:67). Pengakuan kuasa atas orang yang sudah mati dapat dimaknai bahwa kekuasaan dari orang yang sudah mati secara terus menerus mempengaruhi orang hidup. Di sini pandangan Jawa dalam memaknai kematian berbeda ketika yang mengalami mati adalah orang biasa. Dalam masyarakat Jawa “para raja” ketika ia mengalami kematian ada kesaktian dalam tubuhnya, walaupun jasadnya telah mati, namun rohnya hidup. Menurut Anderson, logika dan konsep tradisional Jawa mengenai kesaktian memerlukan suatu pemusatan, penyatuan, penyerapan, dan titik pusat ini dinyatakan dalam diri seorang penguasa (Anderson dalam Eryanto 2000: 39). Disini bisa terlihat konsep kekuasaan dimaknai orang Jawa, yaitu sebagai sebuah bentuk yang sifatnya konkret, homogen, konstan dan tanpa implikasi-implikasi moral. Konsep kekuasaan Jawa adalah kekuasaan yang selalu bertambah, tidak bisa dibagi-bagi, tidak lebih dan tidak kurang. Karena itu, kekuasaan Jawa melahirkan kekuasaan yang bersifat mutlak di mana seorang penguasa mempunyai mental otoriter yang anti- kritik dan anti-

oposisi, karena dalam pandangan penguasa Jawa, oposisi mengurangi tingkat kekuasaannya. Ini dijelaskan Anderson dalam memandang penguasa Jawa yang melihat oposisi sebagai kekuatan yang akan mengurangi kekuasaan dan bukan sebaliknya:

“Dia ingin meraih kekuasaan sebanyak-banyaknya, dia tidak suka dikritik, apalagi dilawan dalam bentuk oposisi, meskipun perlawanan ini hanya dalam bentuk oposisi loyal karena kritik, oposisi dan sejenisnya menunjukkan bahwa lawan punya kekuasaan, kekuasaan lawan akan mengurangi kekuasaan sang raja, maka kritik dan oposisi harus ditiadakan. Akibatnya penguasa Jawa selalu berusaha otoriter dan menumpas semua kekuatan yang mau melawannya, betapapun kecilnya” (Anderson dalam Budiman, 2002:52).

Pandangan Jawa melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang konstan dan memusat hingga sesuatu yang diluarnya dapat mengganggu kekuasaan, karena itu “oposisi” dianggap mengganggu kuasa. Dalam tradisi Jawa tidak mengenal yang namanya oposisi, bukan dipandang sebagai penyeimbang kekuasaan, malah sebaliknya akan mengancam jalannya kuasa.

Selain itu, kuasa dalam konsep Jawa penyebarannya dapat dilihat dalam bentuk simbol. Simbol-simbol berfungsi sebagai wujud dari kepatuhan terhadap sang kuasa. Karena itu, simbol juga dimaknai sebagai strategi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Kuntowijoyo menjelaskan pemaknaan simbol mengenai kekuasaan sebagai berikut:

“Rekayasa simbolik selalu masuk dalam program setiap kekuasaan, sebab penguasa tidak akan lestari ditempatnya kalau kehilangan kontrol atas dunia simbolik.

Bagaimanapun simbol-simbol yang dimiliki dan beredar di masyarakat harus dikuasai supaya masyarakat atas rakyat tetap terkuasai. Tidak mengherankan kalau setiap penguasa senantiasa memproduksi dan mereproduksi simbol-simbol, baik simbol verbal maupun simbol non verbal yang dapat memperkuat, memapankan dan mengukuhkan kekuasaannya. Bersamaan dengan ini penguasa akan melakukan kontrol terhadap simbol-simbol yang ada di dalam masyarakat” (Kuntowijoyo dalam Eriyanto, 2000: 63-64).

Simbol-simbol tersebut sebagai alat kontrol penguasa untuk menertibkan masyarakat dalam keberlangsungan kekuasaan. Pada masa feodalisme simbol-simbol diciptakan oleh para pujangga kerajaan. Misalnya, *Nagarakertagama* yang ditulis pada tahun 1365, pada masa kejayaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk, *Babad Tanah Jawi* yang berisi kisah tentang raja-raja dinasti Mataram, yang selesai ditulis tahun 1836 atau cerita mitos Nyai Roro Kidul. Di dalam kisah mitis ini, Nyai Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan. Dari cerita mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat, Nyai Roro Kidul menjaga Laut Selatan dari segala ancaman dan marabahaya. Konon ia tidak menyukai sesuatu yang berbau hijau. Oleh karena itu, apabila ada orang pergi ke pantai selatan dengan baju berwarna hijau, maka dia akan hilang. Menurut cerita setempat, orang yang berbaju hijau tersebut dibawa oleh Nyai Roro Kidul. Entah cerita ini betul atau tidak, perlu diketahui bahwa baju hijau identik dengan pasukan laut tentara kompeni Belanda. Menjadi pertanyaan, apakah ketidaksukaan Nyai Roro Kidul dengan baju hijau sama dengan ketidaksukaan para bangsawan keraton dengan kompeni Belanda yang menguasai Mataram? Desas-desus yang beredar mengenai cerita Nyai Roro Kidul ini memang sengaja diciptakan oleh

pujangga Jawa untuk keberlangsungan kekuasaan para raja. Alasannya, secara politis jatuhnya kerajaan Mataram ke tangan Belanda akan mempengaruhi kesetiaan rakyat terhadap kerajaan Mataram (Toer dalam Baskara, 2001:47). Disini kuasa berjalan, rakyat menganggap raja mempunyai kesaktian karena dapat bersekutu dengan penguasa Laut Selatan. Dengan adanya kisah ini, para penguasa menanamkan pemikiran bahwa mereka memiliki kekuasaan karena diberkati oleh Tuhan dan sebagai wakil dari Tuhan.

Jika dilihat pandangan Jawa dalam memandang kekuasaan, barat justru melihat sebaliknya. Ada empat konsep kekuasaan dalam pandangan barat. Pertama, kekuasaan adalah abstrak, kedua, sumber-sumber kekuasaan adalah heterogen, ketiga, penumpukan kekuasaan tidak memiliki batasan inheren dan keempat, kekuasaan secara moral ambigu. Perbedaan pandangan antara barat dan jawa dalam melihat kekuasaan berakar dari histori yang berbeda, konsep kekuasaan seperti sesuatu yang abstrak paling sedikit harus mundur kepada Machiavelli. Pikiran tentang sumber-sumber kekuasaan yang heterogen mulai berkembang menjadi filsafat, yaitu sejak Montesquieu dan para penggantinya sejak jaman pencerahan (Anderson, 2000:44-46). Dilihat dari sejarah, maka kekuasaan barat merupakan produk dari evolusi intelektual yang cukup panjang.

Arief Budiman dalam bukunya mengenai kekuasaan, lebih cenderung kepada lembaga dalam melihat kekuasaan, yaitu negara yang memiliki kekuasaan mutlak untuk memaksakan kehendaknya terhadap warganya (Budiman, 2002:21). Pemahaman ini mempunyai sejarah yang panjang. Ada yang mengatakan kekuasaan

itu datangnya dari Tuhan yang maha kuasa, ada yang mengatakan bahwa kekuasaan diperoleh dari masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat. Namun, dari manapun asal kekuasaan itu, semua teori pada dasarnya menyatakan bahwa kekuasaan negara itu bertujuan menciptakan kebaikan dan ketertiban bagi masyarakat di wilayah kekuasaannya (Budiman, 2002:117-118).

Kekuasaan dalam pandangan Marxis melihat negara sebagai alat kelas yang dominan (Budiman, 2002: 56-57). Kaum Marxis beranggapan bahwa negara merupakan alat dari kelas yang berkuasa untuk melakukan penindasan terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat feodal, kelas bangsawan yang menguasai negara, dalam masyarakat kapitalis, kelas pemilik modal, dan seterusnya. Karena itu, di masyarakat manapun, selalu terjadi pertentangan antar kelas. Pandangan Marxis mengenai kekuasaan berpusat pada negara sebagai pelayan bagi kelas yang berkuasa yaitu kelas borjuis dengan didasarkan pada realitas yang ada bahwa kebijakan negara selalu mengakomodir kepentingan kelas borjuis untuk menindas kelas proletar. Asumsi Marxis mengenai negara sebagai pelayan bagi kepentingan kelas borjuis bukan hanya angan-angan atau khayalan semata, namun melihat kondisi objektif masyarakat.

Berbeda dengan Kaum Marxis yang banyak mengurai mengenai orang-orang yang berkuasa seperti negara, parlemen, institusi agama. Michael Foucault (1926-1984), salah satu ilmuwan postmodernisme lebih melihat bagaimana mekanisme kuasa atau strategi kuasa. Tema ini inilah yang menjadi fokus perhatian Foucault (Junaedi, 2007:68). Foucault menjelaskan empat konsep kuasa. Pertama, kuasa

bukanlah milik melainkan strategi. Maksudnya kuasa biasanya disamakan dengan milik. Kuasa dianggap sebagai sesuatu yang dapat diperoleh, disimpan, dibagi, ditambah, dan dikurangi. Tapi dalam pandangan Foucault kuasa tidak dimiliki tapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berelasi satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran (Bartens, 2001:320). Kedua, kuasa tidak dapat dilokalisasi tetapi ada di mana-mana. Biasanya kuasa dihubungkan dengan dengan orang atau lembaga tertentu, khususnya aparat negara. Tapi menurut Foucault strategi kuasa berlangsung di mana-mana. Di mana saja terdapat terdapat susunan, aturan, sistem regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai relasi tertentu sama lain dan dengan dunia luar di situ kuasa sedang bekerja. Sebagai contoh adalah bahwa setiap masyarakat mengenal berbagai strategi kuasa yang menyangkut berbagai kebenaran: beberapa diskursus menerima dan disebarluaskan sebagai benar. Dalam hal ini terdapat institusi-institusi yang menjamin perbedaan antara yang benar dan tidak benar. Selain itu terdapat pelbagai aturan dan prosedur untuk memperoleh dan menyebarkan kebenaran (Junaedi, 2007:68-69). Berhubungan dengan hal ini, Foucault mengaitkan ilmu pengetahuan dengan kekuasaan; Foucault menolak ide ilmu pengetahuan yang dikejar demi pengetahuan sendiri, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Ranah keilmuan secara implisit menyingkirkan kandungan ilmu pengetahuan alternatif seperti yang “palsu”. Dalam hal ini, kehendak untuk kebenaran diasosiasikan kehendak untuk berkuasa; ranah keilmuan yang satu berusaha untuk mencapai hegemoni atas ranah-ranah yang lain (Ritzer, 2003:79).

Ketiga, kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan atau represi, tetapi melalui normalisasi dan regulasi. Keempat, kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif. Yang dimaksudkan dengan Foucault disini adalah bahwa kuasa tidak menghancurkan, tetapi menghasilkan sesuatu. Hal ini merupakan penolakan Foucault terhadap sebagian pandangan yang menyatakan bahwa kuasa merupakan sesuatu yang jahat dan harus ditolak, karena menolak kuasa sendiri termasuk dari strategi kuasa. Tidak mungkin memilih kuasa kawasan di luar kawasan strategi kuasa itu sendiri (Junaedi, 2007:70). Kuasa itu produktif, kuasa memungkinkan segala sesuatu. Tetapi mendekati kuasa dengan cara positif itu tidak sama dengan mendewa-dewakan masyarakat faktual dan tatanan politik yang ada. Dengan perkataan lain, sikap ini tidak sama dengan konservatisme. Mempersalahkan kuasa biasanya dibarengi dengan penolakan untuk menghadapi keadaan yang nyata dan memperbuat sesuatu dengannya (Bertens, 2001:324).

### **E.3 Ideologi**

Pemikir Marxis terkemuka Louis Pierre Althusser (1918-1990), dalam teorinya mengenai ideologi menjelaskannya sebagai “sistem ide-ide dan gambaran-gambaran yang mendominasi pikiran seseorang atau sebuah kelompok sosial” (Althusser, 2007:186). Ia melihat ideologi pada asumsi Marx yang berdasarkan penjelasan mengenai sebuah konsep negara sebagai alat kelas borjuis (Althusser, 2007: 159-160). Menurut Althusser, negara bukan hanya sebagai pelindung kaum borjuis yang sifatnya memaksa, namun bersembunyi dibalik ideologi-ideologi yang sifat lebih halus dan berjalan dengan sendiri. Freud menyebutnya sebagai alam



bawah sadar yang abadi (Althusser, 2007: 190). Penjelasan Althusser bisa dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, ideologis (*Ideological State Aparatus/ISA*), kedua, represif (*Repressive State Aparatus/RSA*).

ISA merupakan elemen penting yang digunakan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. ISA menyangkut beberapa hal seperti ISA keagamaan, hukum, pendidikan, komunikasi, politik, kebudayaan, serikat buruh, dan keluarga (Althusser. 2007:167-168). Ideologi-ideologi ini berfungsi mengontrol individu-individu agar selalu tunduk kepada penguasa. Dalam masyarakat, ideologi memainkan peran dominan bagi keberlangsungan kekuasaan. Bagaimana tidak setiap aktivitas yang dilakukan merupakan lahir dari ideologi-ideologi yang tanpa disadari sikap dan karakter individu dalam suatu masyarakat merupakan representasi dari ideologi yang dihasilkan oleh negara. Pada masa feodalisme, ISA keagamaan memainkan peranan yang penting bagi keberlangsungan kekuasaan. ISA keagamaan (antara lain, sistem gereja yang bermacam-macam). (Althusser, 2007:167)

Peranan ISA keagamaan tidak selamanya berjalan dominan, maksudnya, seiring berjalan waktu ideologi ini tergantikan oleh ideologi pendidikan. Bergantinya peranan ideologi lebih dikarenakan akses pendidikan memainkan peranan penting. Sekarang ini hampir semua individu mempunyai akses untuk dapat menikmati pendidikan, dengan demikian sekolah sebagai lembaga yang mempunyai legitimasi dalam pendidikan sebagai penghasil terbesar terciptanya ideologi-ideologi kelas penguasa. Lewat lembaga ini nantinya tercipta para pekerja-pekerja baru baik yang kelas kasar maupun kelas eksekutif. Sekolah berperan bagi berlangsungnya

reproduksi tenaga kerja, karena dalam masyarakat kapitalis, tujuan seseorang sekolah hanya dapat ijazah yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan.

Reproduksi para calon-calon tenaga kerja dimulai ketika masih anak-anak melalui sekolah, di mana mereka mulai belajar dari membaca, menulis dan menghitung. Lewat mekanisme ini di dapatkan pembagian-pembagian yang berdasarkan pada dua pembagian umum yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Yang mempelajari ilmu alam mendapat spesialisasi sebagai calon ahli eksakta, maka di masyarakat ada sebutan insinyur, yang mempelajari ilmu-ilmu sosial disebut ahli komunikasi. Selain dua pembagian spesialisasi tersebut, para calon-calon tenaga kerja juga dibekali bagaimana berperilaku yang baik tentang aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan. Proses ideologisasi, mungkin saya menyebutnya tengah berlangsung. Para calon tenaga-tenaga kerja ini melalui sebuah proses yang mana mereka dibekali bagaimana mempersiapkan hidup di masa datang dengan pematuhan yang tanpa disadari didorong untuk dilakukan. Aturan-aturan yang ada berdasarkan ketertundukan para calon-calon tenaga kerja untuk selalu tunduk. Ada dua hal yang bisa dipetik dari penjelasan diatas. Pertama, bagaimana para calon tenaga kerja dipersiapkan untuk menjadi seorang yang terampil secara teknis dalam mengerjakan alat-alat produksi. Kedua, bagaimana mereka dipersiapkan untuk tunduk terhadap semua aturan-aturan yang ada dengan mendasarkan pada aturan-aturan yang dibuat kapitalis untuk selalu tunduk pada kebijakan-kebijakan yang ada. Kategori kedua, masuk kepada proses ideologi alat berkuasa (Althusser, 2007:151-155)

Dengan demikian sekolah menjadi alat paling dominan bagi reproduksi tenaga-tenaga kerja, karena melalui institusi ini calon tenaga kerja melewati gemblengan-gemblengan sebelum mereka betul-betul menjadi seorang tenaga kerja. Melalui dinamika ini, sekolah bukan hanya mengajarkan pengetahuan yang sifatnya praktis saja. Namun dalam bentuk-bentuk yang menjamin ketertundukan terhadap kelas yang berkuasa. Sadar atau tidak sadar lewat institusi ini (sekolah), kelak lahir para tenaga kerja yang mengerucut pada spesialisasi-spesialisasi agen-agen kapitalis yang bertingkat-tingkat. Mulai yang paling bawah yaitu pekerja kasar hingga manajer. Definisi ini pada pembagian-pembagian menurut Marx akan didapatkan dua kelas yang saling bertentangan yaitu kelas peng-eksploitasi (borjuis dan agen-agenya. Para agen-agenya maksudnya pembantu-pembantu pengeksploitasi yaitu para manajer, orang-orang suci, yang mana proses ideologisasi tadi mereka dapatkan ketika masih di bangku sekolah dengan pelajaran-pelajaran tentang budi pekerti mana baik, mana buruk) dan kelas tereksploitasi (proletar) (Althusser, 2007:153-156).

Dalam RSA, Althusser menjelaskan negara sebagai alat kelas berkuasa yang menjalankan kekuasaannya menggunakan alat-alat kekerasan, paling tidak menggunakan kekerasan (karena ada represi, sebagai misal represi administrasi, yang mengambil bentuk-bentuk non- fisik). Alat-alat represif negara sebagai kelas berkuasa meliputi tentara, birokrasi, polisi, peradilan, penjara dan sebagainya. Mereka-mereka ini berfungsi untuk mengamankan kekuasaan sebagai alat bagi kelas penguasa. Setiap tindakan yang dianggap mengganggu kekuasaan kelas penguasa,

dilakukan tindakan-tindakan untuk meredamnya, perangkat-perangkat kekuasaan berfungsi untuk “menertibkan” menurut bahasa Althusser domba-domba yang tersesat (Althusser, 2007:170).

Althusser jeli menjelaskan bagaimana kekuasaan yang dilakukan oleh kelas penguasa bukan hanya menyangkut beberapa bagian saja, melainkan ke seluruh sendi kehidupan. Ekspansi yang dilakukan kelas penguasa memperlihatkan bagaimana ISA masuk ke dalam seluruh aspek manusia. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu selalu diawasi oleh kelas penguasa. ISA masuk melalui agama, hukum, pendidikan, keluarga, politik, budaya, komunikasi.

Identitas-identitas manusia menjadi kabur dengan sendirinya dan tanpa disadari kita hidup dalam satu kesatuan yang mengglobal. Perkembangan teknologi yang begitu cepat membawa manusia ke dalam rongga-rongga riak yang dalam hingga terjerembam ke dalam sebuah ketidaksadaran. Ideologi masuk dengan beragam warna mulai melalui cara-cara yang paling halus hingga tindakan paling kasar. Televisi merupakan salah satu bagian yang dominan dalam menyebarkan ISA. Acara musik anak muda, iklan-iklan yang mengilusi hingga berita *infotainment* (sebuah berita yang banyak meliput aktivitas kaum selebritis) adalah salah satu bagian dari penyebarannya. ISA dalam bentuk infotainment sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Gaya hidup selebritis yang ditampilkan infotainment merepresentasikan citra diri manusia yang hidup berada dalam ordinari luar manusia. Ilusi-ilusi yang ditampilkan oleh kaum selebritis dengan sendiri berpengaruh pada para penonton mulai dari ABG hingga ibu-ibu

rumah tangga. Anak-anak ABG tanpa sadar meniru gaya para idola mereka yang ada di televisi mulai cara berpakaian sampai tingkah laku.

Selain ISA dan RSA, Althusser menampilkan konsep yang dinamakan interpelasi, yaitu subjek yang memanggil individu-individu sebagai ideologi. Yang berarti bahwa tidak ada ideologi kecuali bagi subjek-subjek yang konkret, dan peruntukkan subjek ini hanya mungkin karena adanya ideologi, dengan kata lain karena adanya subjek dan penggunaan kategori tersebut (Althusser, 2007:201). Sebagai contoh iklan-iklan pemutih kulit. Di dalam iklan dapat dilihat bagaimana kecantikan di lokalisir dalam bentuk satu kesatuan. Misalnya, seorang yang cantik harus mempunyai kulit putih. Secara tidak sadar terbentuk bahwa yang cantik adalah berkulit putih dan diluar yang “tidak putih” masuk dalam kategori tidak cantik. Maka, banyak wanita-wanita yang menginginkan mempunyai kulit putih, mereka melakukannya dengan segala cara seperti membeli produk-produk pemutih kulit, rajin ke salon dsb. Jika dilihat lebih dalam hal tersebut sebetulnya sangat membingungkan, karena Indonesia secara geografis sebagai negara tropis, yang pastinya mayoritas berkulit coklat sawo matang. Pertanyaan mendasar adalah apakah dengan kulit sawo matang masyarakatnya jelek-jelek karena berkulit tidak putih? Di sini iklan telah berhasil membentuk konsep kecantikan menurut selera produk. Ketika iklan ditampilkan dengan sendirinya telah terjadi pemanggilan-pemanggilan terhadap subjek-subjek.

#### **E. 4. Sastra sebagai Kritik Sosial**

Banyak orang awam mengatakan bahwa sastra hanya menawarkan semacam mimpi-mimpi penuh dusta (Dahana, 2001: 23). Dusta kemudian melahirkan kembali mimpi-mimpi itu, ibarat siklus yang berputar dalam satu poros. Namun, benarkah dakwaan yang dilimpahkan orang awam kepada karya sastra tersebut sepenuhnya benar? Tentu saja karena sastra adalah dunia reka. Bukan dunia sendiri. Ia hanya refleksi, hanya bias atau bayang dari kenyataan yang mewakilinya. Dan atau apapun yang bukan nyata, namun menyerupainya, hanyalah dusta. Sastra adalah dusta di dalam dirinya. Demikianlah kartun, komik, komedi, tragedi atau apapun yang dijelma dalam sastra. Ia dapat menjadi kebenaran melalui membenaran-pembenaran yang terjadi secara individual.

Dusta adalah sebuah kebohongan, begitu menurut pandangan orang awam. Yang menjadi pertanyaannya kemudian, apakah sastra hanya sebuah mimpi penuh dusta? Bukankah sastra juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mengungkap kebenaran. Sastra juga dapat berguna sebagai alat perjuangan untuk melawan kebohongan, melawan penguasa lalim atau sebagai alat kritik sosial terhadap struktur masyarakat yang menindas. Sastrawan besar, Maxim Gorki terkenal dengan kata-kata “*the people must know their history*” (setiap orang harus mengetahui sejarahnya) (Toer, 2008:29). Pernyataan ini bukan hanya sebuah kata-kata yang tiada arti. Ia bermakna, ketika Gorki mengatakan orang harus mengetahui sejarahnya, kalimat tersebut secara eksplisit bermakna ada yang disembunyikan oleh penguasa. Jika ada yang disembunyikan, berarti ada kebohongan.

Sastra menjadi alat perlawanan bagi individu yang mulai resah dengan sikap penguasa yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pramoedya Ananta Toer menulis novel berjudul *Korupsi* pada tahun 1952 yang berisi mengenai persengkolan pengusaha dengan pejabat untuk melakukan korupsi. Di awal kisah korupsi, Pram menampilkan tokoh Bakir seorang pegawai negeri yang mempunyai jabatan tinggi pada awalnya bekerja dengan jujur, namun sebagai seorang kepala keluarga. St. Kartono dalam esainya mengenai novel korupsi menggambarkan para tokoh yang ditampilkan oleh Pramoedya sebagai berikut:

“Walau Bakir mempunyai jabatan penting namun dalam realitasnya keluarga selalu kekurangan. Di masyarakat yang mempunyai budaya patriarki bahwa bapak adalah seorang pemimpin keluarga dalam kata pemimpin tercakup pula makna penguasa dan penanggung jawab. Kemapanan kekuasaan dari segi budaya didukung kemapanan kekuasaan di bidang pemerintahan. Seorang kepala bagian di suatu kantor berkuasa atas banyak pegawai, sekaligus mengurus langsung atas satu bidang tertentu. Peran bapak dan kepala bagian dilakukan oleh bakir dengan penuh kejujuran, kejujuran inilah yang selama ini mendasari segala tindakan dan keputusan di kantor dan di rumah. Kejujuran saja tidak menjamin kemapanan ekonomi keluarga Bakir. Tanggung jawab keuangan keluarga telah mengusik status kepegawaiannya dan kejujurannya. Tokoh Bakir yang korup mempunyai kekuasaan dipertentangkan dengan Sirad bawahannya di kantor. Pram menampilkan Sirad sebagai mahasiswa doktoral, intelektual, jujur dan berani. Bakir dipertentangkan juga dengan istrinya yang tidak banyak bicara, tapi tegas dalam bersikap dan mempunyai kejujuran yang kuat” (Kartono, 2002: 31).

Penjelasan St. Kartono di atas dalam menganalisa novel Pramoedya, dengan terang menjelaskan bagaimana praktek korupsi merekat dalam sebuah struktur

kekuasaan yang memungkinkan seorang dengan mudah melakukan korupsi. Dan korupsi dalam jumlah besar kerap dilakukan oleh pejabat. Cara korupsi yang diterangkan oleh Pramoedya di novel tersebut jika dicermati banyak dilakukan oleh para pejabat. Kasus Tanjung Si Api-Api yang melibatkan anggota dewan dengan tersangka Emir Yusuf Faisal ada banyak kesamaan seperti yang ada di dalam novel Korupsi Pramoedya, atau kasus pengadaan barang untuk alat komunikasi di Departemen Kehutanan dengan rekanan bisnis PT Massaro yang melibatkan mantan Menteri Kehutanan (walau sampai saat ini statusnya hanya sebagai saksi, namun tidak menutup kemungkinan statusnya akan dinaikkan menjadi tersangka) dengan pengusaha Anggoro Widjojo yang merugikan negara hampir 5 Milliar (*Kompas*, 25 Oktober 2009).

Entah kebenaran atau tanpa disengaja praktek korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ada banyak kesamaan dengan cerita yang ada di novel korupsi. Dengan begitu, menjawab pertanyaan yang ada diatas, bahwa karya sastra hanya sebuah rekaan khayal manusia penuh dusta menjadi terjawab. Sastra bukan hanya dusta, ia menjadi alat kritik sosial. Sastra sebagai kritik sosial lahir di dalam masyarakat yang melakukan kecurangan, penuh dusta. Sastra mengintrepetasikan masyarakat yang tertekan. Sastra bukan khayalan, tapi sebuah kenyataan. Sastra menjadi alat perjuangan atau sebagai kritik sosial. Pramoedya menyebutnya sebagai Realisme Sosialis (Toer, 2008). Mengenai Realisme Sosialis Pramoedya menjelaskannya sebagai berikut:



“Realisme –sosialis, seperti tampak pada namanya, adalah istilah yang terdiri atas dua kata yang dimajemukkan. Realisme sebagai istilah kesenian dan sastra umumnya bukanlah realisme sebagaimana dikenal oleh dunia Barat selama ini, tapi realisme sesuai dengan istilahnya menurut tafsiran sosialis. Realisme sosialis sesuai dengan istilahnya dengan sendiri bukanlah realisme Barat. Perbedaan ini perlu karena antara kedua realisme ini bukan hanya terdapat perbedaan tafsiran, tetapi yang penting untuk diketahui adalah adanya perbedaan dalam perkembangannya. Realisme Barat, atau lebih tepatnya dinamakan realisme borjuis, merupakan pembatasan terhadap pandangan seseorang pada realitas-realitas an sich tanpa membutuhkan kritik. Sebaliknya, realisme sosialis sebagai metode sosialis menempatkan realitas sebagai bahan-bahan global semata untuk menyempurnakan pemikiran dialektik. Bagi realisme sosialis, setiap realitas, setiap fakta, Cuma sebagian dari kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri. Realitas hanya satu fakta bagi perkembangan dialektik” (Toer, 2008:18).

Selain Pramoedya yang menulis *Korupsi* pada tahun 1952, sebagai bentuk kritik terhadap para birokrat di masa awal kemerdekaan. Mochtar Lubis pun melakukannya ketika mengkritik pemerintahan Presiden Soekarno pada waktu itu. Novelnya yang berjudul “*Senja di Jakarta*” bahkan mendapatkan penghargaan *Magsaysay Awards* pada tahun 1958. Novel ini bercerita mengenai sekelumit kehidupan sosial masyarakat Jakarta pada masa itu mulai dari kemiskinan yang merajalela, pertikaian politik, sembako yang membumbung tinggi hingga retorika basi para pejabat negara (Lubis, 1993:23). Kesemua fenomena itu di rangkum dalam cerita Mochtar, sebagai bagian dari kritik akan kondisi masyarakat.

Di tengah makin rumitnya permasalahan sosial yang mencekik rakyat banyak, penguasa malah sibuk bertikai memperebutkan kekuasaan. Di dalam

ceritanya, Mochtar menampilkan tokoh yang mewakili beberapa karakter masyarakat masa itu. Tokohnya meliputi supir truk, penjual nasi, pedagang asongan, pengangguran dan lain-lain. Semua tokoh yang ada merupakan kelompok masyarakat dalam kelas sosial paling bawah. Mengapa Mochtar menampilkan tokoh dengan latar belakang kelompok kelas menengah kebawah? Karena kelompok tersebut adalah kelompok yang paling dirugikan. Di cerita ini ditampilkan para supir truk disela-sela istirahat menghabiskan waktu dengan bermain kartu (Lubis, 1993:45). Di tengah asyik bermain kartu obrolan “politik” menjadi tema “dominan”, mereka membicarakan harga sembako yang semakin mahal, biaya sekolah tinggi, kerusakan politik para elite, hingga kisah percintaan. Pertikaian, hubungan antara masyarakat, kerumitan hidup masyarakat ditampilkan jelas oleh Mochtar. Selain dari kalangan kelas bawah, Mochtar juga menampilkan tokoh dari kelas menengah seperti mahasiswa. Obrolan mahasiswa tentu berbeda dengan para sopir yang berbicara politik di tengah asyiknya bermain kartu, namun mempunyai esensi yang sama, yaitu ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Cerita Mochtar Lubis dan Pramoedya Ananta Toer mempunyai satu “kesamaan”, yaitu novel yang berdasarkan pada karya sastra sebagai alat kritik terhadap kondisi sosial yang ada. Mereka mewakili suara masyarakat kecil. Cerita mereka bukan hanya kisah khayalan belaka atau imajinasi seorang penulis kesepian, namun menjadi cerita yang berdasar pada keadaan yang terjadi di dalam masyarakat. Di sini sastrawan memainkan peran dalam menceritakan tentang keadaan akan fenomena yang ada.

Terlihat jelas bahwa sastra sebagai kritik sosial ada dalam diri masyarakat yang mengalami ketidakadilan, lahir di dalam diri rakyat kecil. Sastra realisme adalah sastra yang berbicara mengenai rakyat jelata, berpihak dan menyampaikan kepada rakyat bahwa segala ketidakadilan harus dilawan. Sastra bukan hanya khayalan semata, atau hanya bercerita mengenai keindahan. Ia menjadi sarana untuk mengkritik sebagai bentuk perlawanan terhadap realitas yang menindas.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **F.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisis wacana, yaitu analisis/kajian tentang struktur pesan dalam komunikasi atau suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari komunikator yang mengungkapkan suatu pernyataan. Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, fungsi ucapan tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana. Wacana merujuk pada pemakaian bahasa tertulis atau ucapan tidak hanya dari aspek kebahasaannya saja tetapi juga bagaimana bahasa itu diproduksi dan ideologi dibalikinya. Memandang bahasa semacam ini berarti meletakkan bahasa sebagai bentuk praktek sosial. Bahasa adalah suatu bentuk tindakan, cara bertindak tertentu dalam hubungannya dengan realitas sosial (Eriyanto, 2000:6).

Wacana sendiri diartikan sebagai penggabungan antar kalimat, bisa juga sebagai komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang atau kepercayaan, nilai dan kategori yang masuk didalamnya kepercayaan disini mewakili

pandangan dunia, sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman, dapat dimaknai kadang kala sebagai sebuah bidang dari sebuah pernyataan, dan kadang kala sebagai praktek regulatif yang dilihat dari sebuah pernyataan, sebuah percakapan khusus yang alamiah formal dan pengungkapannya diatur pada ide dalam ucapan dan tulisan, bisa juga pengungkapan dalam bentuk sebuah nasihat, risalah, dan sebagainya, sebuah unit yang dihubungkan ucapan atau tulisan, rentetan kalimat yang berkaitan, yang dihubungkan proposi satu dengan proposi lainnya, membentuk satu kesatuan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. (Eriyanto, 2001:2).

Wacana di sini juga dipahami sebagai politik berkomunikasi, sehingga kita perlu menyelidiki makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari suatu pernyataan. Bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan tidak terpisahkan dari komunikator sebagai penyampai pesan. Komunikator justru sangat sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam hal ini, komunikator memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana, termasuk wacana yang transparan dan memerlukan interpretasi. Bahasa dan wacana diatur dan dihidupkan oleh pengucapan-pengucapan yang bertujuan, setiap pernyataan adalah tindakan penciptaan makna. Dan khalayak juga mempunyai penafsiran sendiri terhadap bahasa yang muncul. Di sini bahasa bukan hanya diterima secara apa adanya, tetapi ditanggapi sebagai perantara bagi pengungkapan-pengungkapan maksud dan makna tertentu (Eriyanto, 2000:9).

Kemudian bahasa bukanlah sekedar saluran tempat pengkomunikasian informasi tentang keadaan mental utama atau perilaku atau fakta-fakta dunia ini. Sebaliknya, bahasa merupakan alat yang menggerakkan, dan akibatnya menyusun, dunia sosial itu sendiri. Selain itu, bahasa juga menata hubungan-hubungan dan identitas-identitas sosial. Maksudnya bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam wacana merupakan alat untuk mengubah dunia sosial. Perjuangan-perjuangan yang muncul dalam tataran kewacanaan terjadi dalam upaya untuk mengubah maupun mereproduksi realitas sosial (Jorgensen&Phillips, 2007:18).

## **F.2 Obyek Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebuah buku, karena itu objek penelitian ini bersumber pada objek buku sastra sejarah yang berjudul "*Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*".

## **F.3 Teknik Pengumpulan Data**

### **A. Data Primer**

Data menggunakan referensi yang bersumber dari sastra sejarah yang menjadi bahan penelitian yaitu sastra sejarah *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels* karya Pramoedya Ananta Toer, berupa kalimat, kata, yang mendukung dan relevan dengan tujuan penelitian.

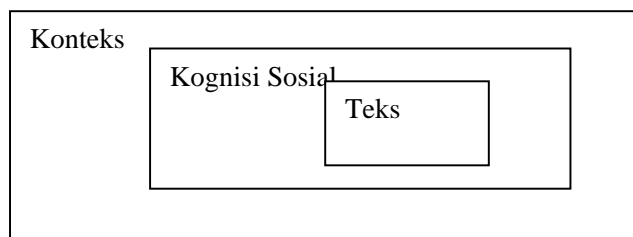
## B. Data Sekunder

Referensi yang digunakan adalah sumber yang diperoleh melalui, buku-buku, internet serta sumber lain yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini.

### F.4 Analisis Data

Metode analisis wacana yang digunakan adalah menurut Teun A. Van Dijk, ada beberapa faktor yang harus dibahas. Dalam hal ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**



*Sumber: Eriyanto (2001:225)*

#### A. Analisis Teks

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis wacana sesuai dengan metode penelitian ini. Analisis wacana ini menitikberatkan pada studi terhadap praktek kekuasaan kolonial dalam buku *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Melalui analisis data ini dapat diketahui bagaimana Pramoedya menggambarkan praktek kekuasaan kolonial di dalam buku *Jalan Raya Pos*. Selanjutnya, dalam analisis wacana terhadap Buku

Jalan Raya Pos ini menggunakan model Wacana Teun A. Van Dijk yang terdiri dari beberapa elemen analisis sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Model Struktur Wacana Teun A. Van Dijk

| <b>Struktur wacana</b> | <b>Hal yang diamati</b>  | <b>Elemen</b>                                       |
|------------------------|--|---|
| <b>Struktur Makro</b>  | <b>TEMATIK</b><br>Tema topik yang dikedepankan dalam suatu berita  | Topik   |
| <b>Superstruktur</b>   | <b>SKEMATIK</b><br>Bagaimana bagian dan urutan berita dikemas dalam teks berita utuh   | Skema   |
| <b>Struktur Mikro</b>  | <b>SEMANTIK</b><br>Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Misal dengan memberi detail pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detail lain | Latar, detil, maksud, pengandaian, dan nominalisasi |
|                        | <b>SINTAKTIS</b><br>Bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih   | Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti               |
|                        | <b>STILISTIK/LEKSIKON</b><br>Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita   | Leksikon  |
|                        | <b>RETORIS</b><br>Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan  | Grafis/gambar, metafora, dan ekspresi               |

Sumber: Eriyanto (2001:228)

Kaitan berita yang dimaksud dalam teori Teun A. Van Dijk dalam buku adalah sebuah informasi dari isi buku tersebut yang ingin disampaikan kepada pembaca. Buku sastra yang berisikan tentang kritik sosial mengandung makna berita yang disampaikan secara kreatif dan dikemas melalui pesan dan urutan antara kalimat yang menjelaskan maksud dari penulis sehingga mampu menjadi bahasan yang dibedah secara struktur dan urutan.

#### 1. *Tematik*

Tematik adalah pembedahan isi dengan menentukan tema atau topik. Topik yang ditentukan harus dapat dijadikan landasan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang utama dari suatu teks. Penulis harus mampu menentukan topik dan menyampaikan apa yang dimaksud oleh komunikator, dalam hal ini buku. Karena itu topik menunjukkan tema sentral, konsep dominan, dan paling penting dari suatu berita. Topik yang menggambarkan gagasan secara umum dalam sebuah teks berita, akan didukung oleh subtopik-subtopik lain yang saling menguatkan terbentuknya topik secara umum (Sobur, 2002:75).

#### 2. *Skematik*

Kalau topik menunjukkan makna umum dari suatu wacana, maka struktur skematis atau supra struktur menggambarkan bentuk umum dari suatu teks. Bentuk wacana umum itu disusun dengan sejumlah kategori atau pembagian umum seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecahan, penutup dan



sebagainya (Eriyanto, 2000:10). Skematik sendiri merupakan strategi yang dilakukan komunikator untuk mendukung makna umum dengan memberikan sejumlah alasan pendukung. Skematik menunjukkan skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir dan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti. Meskipun memiliki skema atau alur yang beragam, berita umumnya memiliki dua kategori skema besar. Pertama, *summary* yang ditandai oleh judul dan lead atau ringkasan tema yang ingin disampaikan oleh wartawan dalam hal ini *penulis*. Kedua, *story* yaitu isi berita secara keseluruhan.

Menurut Teun A. Van Dijk, arti penting dari skematik ialah strategi wartawan atau *penulis* untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Struktur skematik memberikan tekanan sebagai bagian strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya penyembunyian itu dilakukan dengan menempatkan bagian penting di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol (Sobur, 2002:76).

### 3. *Semantik*

Hal terpenting dalam analisis wacana adalah makna yang ditunjukkan oleh struktur teks. Semantik tidak hanya mendefinisikan bagaimana yang terpenting dari struktur wacana, tetapi menggiring ke arah sisi tertentu dari satu peristiwa. Strategi semantik selalu dimaksudkan untuk menggambarkan diri sendiri atau kelompok sendiri secara positif; sebaliknya, menggambarkan kelompok lain secara buruk, sehingga

menghasilkan makna yang berlawanan. Elemen semantik disajikan meliputi latar atau elemen wacana yang menampilkan alasan makna itu sehingga dapat dijadikan pembenaran gagasan yang diajukan dalam suatu teks. Berikutnya adalah elemen wacana *detail* yang berhubungan dengan kontrol informasi yang disampaikan seorang komunikator (Sobur, 2002:78).

#### 4. *Sintaktis*

Strategi untuk menampilkan diri sendiri secara positif dan lawan secara negatif, dilakukan dengan menggunakan pemakaian kata ganti, aturan tata kata. Kategori sintaktis biasanya dilakukan secara spesifik pada kalimat aktif atau pasif, peletakan anak kalimat atau pemakaian kalimat yang kompleks. Elemen ini menggunakan strategi koherensi atau pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang mendukungnya (Sobur, 2002:80).

#### 5. *Stilistik/Leksikon*

Pada dasarnya elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Kata yang digunakan bukan hanya faktor kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas (Sobur, 2002:82).

## 6. *Retoris*

Retoris merupakan gaya yang diungkapkan ketika seseorang berbicara atau menulis. Kata yang diungkapkan biasanya secara *hiperbolik*. Fungsinya mengungkapkan secara persuasif dan berhubungan erat dengan bagaimana pesan itu ingin disampaikan kepada khalayak. Secara tektis pemakaiannya menggunakan gaya repatisi (pengulangan), aliterasi (pemakaian kata-kata yang permulaannya sama bunyinya seperti sajak) yang bertujuan untuk menekankan sesuatu dan mencari perhatian khalayak. Strategi retorik juga muncul dalam bentuk interaksi, yakni bagaimana pembicara menempatkan dirinya diantara khalayak. Apakah memakai gaya formal, informal atau malah santai yang menunjukkan kesan bahwa ia menampilkan dirinya. Seorang komunikator yang ingin dihormati atau ingin terlihat berwibawa misalnya menciptakan pemakaian kalimat dan gaya bahasa yang kaku dan formal. Sebaliknya seorang komunikator yang egaliter akan menciptakan pemakaian kalimat yang tidak formal dengan menggunakan pemakaian bahasa sehari-hari dan mudah dipahami. Yang penting adalah berjalannya aspek interaksi antara komunikator yaitu apakah komunikator ingin terlihat sejajar atau tidak dengan khalayak.

### B. Analisis Kognisi Sosial

Analisis Wacana tidak hanya membatasi perhatiannya pada struktur teks semata, tetapi juga bagaimana suatu teks di produksi atau bagaimana tepatnya melihat

kognisi sosial atau bagaimana teks media diproduksi, maka dalam hal ini yang diteliti ialah kesadaran dari penulis. Kognisi sosial yang terjadi dan bagaimana strategi penulis dalam membuat cerita. Banyak faktor yang dapat kita lakukan untuk menganalisis pendapat penulis antara lain dilihat dari ideologi, ilmu pengetahuan, perilaku, norma, dan nilai dari sebuah institusi sebagai representasi dari kognisi sosial. Sumber-sumber tersebut yang diperoleh dapat kita konstruksikan sebagai tolak ukur apa yang dimaksud, dan tujuan dari pembuatan tulisan tersebut (Eriyanto, 2001:259).

Dalam pandangan Van Dijk, analisis wacana tidak dibatasi hanya pada struktur teks, karena struktur wacana itu sendiri menunjukkan atau menandakan sejumlah makna, pendapat dan ideologi. Untuk membongkar bagaimana makna tersembunyi dari teks dibutuhkan sebuah analisis kognisi dan konteks sosial. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya proses kesadaran mental dari pemakai bahasa ( Eriyanto, 2001:260).

Karena setiap teks sendiri pada dasarnya dihasilkan lewat kesadaran, pengetahuan, prasangka, atau pengetahuan tertentu atas suatu peristiwa. Penjelasan lewat kognisi dapat dilihat melalui ingatan atau memori. Pendefinisian mengenai ingatan atau memori secara umum dapat dibagi atas dua bagian. Pertama, memori jangka pendek, yaitu memori yang dipakai untuk mengingat peristiwa, kejadian atau hal ingin kita acui yang terjadi beberapa waktu lalu. Contoh, kita mengingat memori nomor teman yang diberikan beberapa jam yang lalu. Kedua, memori jangka panjang,

yakni memori yang dipakai untuk mengingat atau mengacu peristiwa, objek yang terjadi dalam waktu kurun yang lama. Contohnya, ketika kita harus mengingat nomor telepon teman SMA pada waktu tiga tahun (Eriyanto, 2001: 264:265).

### C. Analisis Sosial

Dimensi ketiga dari analisis Van Dijk adalah analisis sosial. Wacana adalah bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dalam meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonsumsi dalam masyarakat. Titik penting dalam analisis ini adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktek diskursus dan legitimasi.

Dalam konteks ini dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang, penulis akan melakukan studi literatur sejarah dan penelusuran kepustakaan. Analisis ini berfungsi untuk menganalisis bagaimana masyarakat melakukan produksi dan reproduksi wacana. Analisis konteks berusaha menganalisis dan mengaitkan wacana di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain. Hasil analisis yang dilakukan diharapkan mampu membuktikan hubungan antara isi tulisan dengan wacana yang terjadi pada realitas sosial sebenarnya (Eriyanto, 2001:271).